

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Roni Setiawan

Program Studi Akuntansi, Ekonomi, Universitas Samudra, Langsa
e-mail: ronisetia065@gmail.com

Raihan Aditya Perkasa

Program Studi Akuntansi, Ekonomi, Universitas Samudra, Langsa
e-mail: raihanadityaperkasa32@gmail.com

Zacky Maulana

Program Studi Akuntansi, Ekonomi, Universitas Samudra, Langsa
e-mail: zackymaulana22003@gmail.com

Abstrak

. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah. Metode penelitian menggunakan tinjauan sistematis literatur. Strategi pemilihan artikel jurnal terkait kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kemampuan sumber daya manusia. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara/daerah dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan mempunyai fokus atau tujuan untuk menyediakan informasi berkualitas yang berguna bagi penggunaannya.

Kata Kunci: Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan, Keuangan.

Abstract

The purpose of this research is to determine the impact of the implementation of Government Accounting Standards (SAP), Human Resource Capability (HRM), and Internal Control System (ICS) on the quality of government financial reporting. The research method involves a systematic literature review. The strategy for selecting journal articles related to the quality of government financial reporting is influenced by factors such as government accounting standards, internal government control systems, and human resource capabilities. Financial reports serve as a form of accountability for the management of national/regional finances within a specific time frame. The focus or objective of financial reports is to provide quality information that is useful to its users.

Keywords: Government Accounting, Financial Reporting, Finance.

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan merupakan suatu persyaratan normatif yang harus diterapkan dalam penyusunan informasi akuntansi dan laporan keuangan agar laporan keuangan yang disusun dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan mencerminkan seberapa baik pemerintah berfungsi. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Proses penyusunan laporan keuangan memerlukan tenaga yang berkompeten dan memahami bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, bahkan urusan organisasi yang berhubungan dengan pemerintahan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. Ketidapahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan (Andini dan Yusrawati. 2015).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban evaluasi pengelolaan APBN pada instansi pemerintah, maka dilakukan audit terhadap laporan keuangan dan pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tergantung pada kualitas penyajian data laporan keuangan instansi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai capaian pelaksanaan APBN sebagai landasan pengambilan kebijakan di masa yang akan datang, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan APBN, dan sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan APBN. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019, Kantor Pemeriksaan Keuangan menemukan 13 permasalahan pada LKPP. BPK telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi, baik dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan.

Kajian Trisnawati dan Wiratmaja pada tahun 2018 menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berdampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Dengan kata lain, semakin baik kualitas pegawai OPD maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan dengan adanya laporan yang dihasilkan maka SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akan berdampak signifikan.

Menurut Nurillah dan Muid D(2014) Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan serta tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal pada pemerintahan. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila Pemerintahan memiliki sistem pengendalian internal yang lemah, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KAJIAN PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian terhadap standar, diukur dengan derajat ketidaksesuaian dan dicapai melalui inspeksi (Mulyana, 2010). Oleh karena itu, kualitas dapat diartikan sebagai penilaian terhadap kinerja pusat tanggung jawab terhadap sesuatu, baik dilihat dari aspek berwujud maupun tidak berwujud seperti barang. Pelaporan keuangan sektor publik pada hakikatnya merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat atas pengelolaan dana masyarakat melalui pajak, bea, dan transaksi lainnya (Masmudi, 2003).

Menurut Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (2009), tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menggambarkan kinerja fungsinya, melaporkan hasil usaha, melaporkan status keuangan, dan melaporkan sumber daya jangka panjang. Secara umum, laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik di masa depan, serta sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran pemerintah. Laporan keuangan juga berfokus pada rencana dan hasil pelaksanaan selama ini, termasuk kinerja pemerintah dan posisi keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Negara merupakan pedoman utama bagi instansi pemerintah dalam menyajikan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan landasan hukum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran dana dalam anggaran serta pelaksanaannya secara transparan, bersih, efisien dan akuntabel, serta digunakan untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pelaporan keuangan yang dihasilkan dari laporan tersebut berkualitas karena memenuhi standar peraturan yang berlaku. Menurut Halim (2012), standar akuntansi merupakan bahan acuan penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi. Standar akuntansi membantu membuat laporan keuangan yang menentukan informasi apa yang harus disajikan kepada pihak luar organisasi. Pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika diterapkan pada standar dan persepsi yang dipahami sama dengan pembuat laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mensyaratkan bahwa sistem pengendalian internal dilaksanakan secara berkesinambungan oleh manajemen dan seluruh pegawai untuk menjamin keyakinan yang cukup terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Hal ini diartikan sebagai suatu proses tindakan dan kegiatan yang terpadu. Untuk meningkatkan keandalan pelaporan keuangan. Melindungi aset pemerintah dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, sistem pengendalian intern nasional merupakan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara menyeluruh pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Purwono (2004: 121) Pengendalian internal pemerintah merupakan segenap rencana, metode serta kebijakan yang terkoordinasi dalam suatu entitas bertujuan mengamankan harta yang dimiliki serta menguji ketepatan dan keakuratan data akuntansi. Berdasarkan pengertian para ahli mengenai sistem pengendalian intern maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses pengendalian yang tidak hanya berkaitan tetapi juga menjalankan tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi dan seluruh pegawai Masu. Acak, reaktif pada kasus tertentu, namun sifatnya kontinyu.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Wibowo (2007), kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang diperlukan dalam pekerjaan itu. Menurut Veithzal (2003), kompetensi adalah kemampuan, keterampilan, dan kemampuan. Kata dasarnya sendiri adalah *Compute* yang artinya cakap, cakap, mampu. Kompetensi mengacu pada kualitas/karakteristik seseorang yang memungkinkannya berhasil dalam pekerjaan. Menurut Satori (2007), kompetensi berasal dari bahasa Inggris *proficiency*, yang berarti keterampilan, kemampuan, dan otoritas. Oleh karena itu, kemampuan adalah hasil yang mengarah pada pencapaian tujuan secara utuh menuju keadaan yang diinginkan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang khususnya pegawai agar dapat mencapai jenjang pegawai yang profesional. Arsyiati (2008) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan modal manusia suatu organisasi. Modal manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang dapat digunakan untuk memberikan layanan profesional yang konsisten dan berkualitas tinggi. Dari pengertian para ahli di atas, kapabilitas SDM dapat diartikan sebagai kemampuan departemen HR dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan tinjauan sistematis literatur. Strategi pemilihan artikel jurnal terkait kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kemampuan sumber daya manusia. Pengumpulan data dilakukan dengan pencarian informasi dari artikel terkait yang diterbitkan melalui *google scholar*,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Hermawan (2022), Standar akuntansi pemerintahan dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang memastikan bahwa laporan keuangan disusun memenuhi persyaratan informasi keuangan yang berguna bagi penggunaannya. Informasi yang berguna menunjukkan bahwa laporan keuangan memenuhi persyaratan informasi. Dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan penelitian Khoer dan Atnawi (2022), Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah di Kabupaten Pavalan. Artinya semakin baik sistem pengendalian intern SKPD maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

Hasil penelitian tersebut konsisten mendukung hasil riset Aziyah dan Yanto (2022) Pengendalian internal yang baik akan memudahkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan pemerintah dan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan teori stewardship yang menyatakan bahwa dalam organisasi sektor publik, pemerintah melayani masyarakat ketika mereka mempunyai tujuan yang sama (Donaldson & Davis, 1991). Sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang bermanfaat.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan penelitian Khoer dan Atnawi (2022), terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD di Kecamatan Pabuaran. Artinya bahwa semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki SKPD, maka akan semakin tinggi pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan.

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Hermawan (2022), kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional dibutuhkan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Sumber Daya Manusia yang profesional akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tuntas, dengan kompetensi yang dimilikinya, Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidang akuntansi (keuangan) mampu menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan membutuhkan kompetensi Sumber Daya Manusia agar laporan keuangan yang disusun memenuhi kualifikasi informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, terlihat jelas bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintahan memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun memenuhi persyaratan informasi keuangan yang berguna bagi penggunaannya. Informasi yang berguna menunjukkan bahwa laporan keuangan memenuhi persyaratan informasi. Selain itu, sistem pengendalian internal pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Tujuan dari SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang cukup terhadap tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemampuan personel berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah produk yang dibuat di bidang akuntansi. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang mampu membuat

dan membuat laporan keuangan yang berkualitas. Menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi memerlukan personel yang kompeten dan memahami akuntansi keuangan pemerintah dan organisasi terkait pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- .(Kuntadi et al., 2022)Kuntadi, C., Saragi, J. E. M., & Syafira, S. I. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi pemerintah, Sistem pengendalian internal pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JIMT (Jurnal Ilmu Manajemen Terapan)*.
- (Sari, 2022)Sari, F. M. (2022). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH, GOOD GOVERNANCE DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten Batang). *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6648>
- Mulyana, I. 2010. Sumber Daya Manusia. Jakarta: SalembaEmpat.
- Jati, B. P. 2019. Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 22(1), 1-14.
- Armando, G. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi). Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang. Maret 2013.
- Munawir. 2014. Analisa Laporan Keuangan. Edisi 4. Liberty: Yogyakarta.
- Khoer, I. M., & Atnawi, A. 2022. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Laporan Keuangan Desa. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 9(1), 12-23.
- Kusnadi, A., Oemar, F., & Supeno, B. 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 51-63.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masmudi. 2003. Laporan Keuangan Sector Public, Antara Konsep Dan Praktek. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sector Public*, Volume 3 No.1
- Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Munira, H. 2022. Analisis Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]*, 2(2).
- Rivai, V. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Pavitasari, E, 2018. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal". Skripsi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri, Yogyakarta, 2018.
- Pradono, C. F., & Basukianto. 2015. "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, September 2015, Hal. 188-200